Dr. Anita Trisiana,S.Pd., M.H.

Anita Trisiana, lahir pada tanggal 22 April 1980, di Tegal, lulusan SI Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (UNS), S2 Ilmu Hukum (UNS), dan lulus S3 Doktor Ilmu Pendidikan (UNS). Dosen PPKn, FKIP pada Universitas Slamet Riyadi Surakarta ini aktif dalam kegiatan penelitian dan publikasi, dan telah menghasilkan karya inovatif yang dihasilkan dari hasil penelitian. Bidang Ilmu yang dikembangkan pada Pendidikan Kewarganegaraan, dikembangkan pula untuk Pendidikan Karakter pada setiap *road map* kegiatan penelitian yang dilakukan, seperti Model pembelajaran, Media pembelajaran, dan juga aktif dalam mengembangkan kreativitas ilmiah untuk mahasiswa.

Dr. Sugiaryo, S.H., M.Pd., M.H.

Sugiaryo, lahir pada tanggal 11 Januari 1963, di Boyolali. Riwayat pendidikan S1 PPKn tahun 1986; S1 Fakultas Hukum tahun 1996; S2 Pendidikan Sejarah 2001;S2 Ilmu Hukum tahun 2010; dan S3 Ilmu Hukum tahun 2016. Saat ini menjadi Dosen PPKn, FKIP pada Universitas Slamet Riyadi Surakarta, dan aktif sebagai Ketua PGRI Kota Surakarta 2009-sekarang, untuk aktif menyuarakan aspirasi dan perjuangan bagi para guru demi terwujudnya generasi yang cerdas.

Dr. Rispantyo, M.Si.

Rispantyo, lahir pada tanggal 28 April 1966, di Karanganyar. Telah selesai studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKP; S2 Akuntansi (UGM), dan S3 Akuntansi (UNS). Sekarang sebagai Dosen Fakultas Ekonomi, pada Universitas Slamet Riyadi Surakarta, dan menduduki jabatan sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik. Mata kuliah yang diajarkan antara lain Akuntansi Keperilakuan; Akuntansi Pemeriksaan/Auditing; Analisis Laporan Keuangan; Akuntansi Manajemen.

Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)
Jl. Rajawali, Gang Elang 6 No.3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581
Telp/Fax : (0274) 4533427
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
cs@deepublish.co.id @penerbitbuku_deepublish
Penerbit Deepublish www.penerbitbukudeepublish.com

Kategori : Pendidikan Karakter
ISBN 978-623-209-764-3
9 786232 097643

Model **Pendidikan Karakter** di Perguruan Tinggi Berbasis **Nasionalisme** dan Implikasinya terhadap Implementasi **Revolusi Mental**

Dr. Anita Trisiana, S.Pd., M.H., dkk.

Dr. Anita Trisiana, S.Pd., M.H. | Dr. Sugiaryo, S.H., M.Pd., M.H.
Dr. Rispantyo, M.Si.

Buku Panduan

Model **Pendidikan Karakter** di Perguruan Tinggi Berbasis **Nasionalisme** dan Implikasinya terhadap Implementasi **Revolusi Mental**

- Dasar-dasar Pengevaluasian Program
- **Pendidikan Karakter**
- Model Proses Implementasi Kebijakan
- **Nasionalisme dalam Implementasi Revolusi Mental**

BUKU PANDUAN

MODEL PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI BERBASIS NASIONALISME DAN IMPLIKASINYA TERHADAP IMPLEMENTASI REVOLUSI MENTAL

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BUKU PANDUAN

MODEL PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI BERBASIS NASIONALISME DAN IMPLIKASINYA TERHADAP IMPLEMENTASI REVOLUSI MENTAL

Dr. Anita Trisiana, S.Pd., M.H.
Dr. Sugiaryo, S.H., M.Pd., M.H.
Dr. Rispantyo, M.Si.

deepublish
glorify and develop the intellectual of human's life

BUKU PANDUAN: MODEL PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI BERBASIS NASIONALISME DAN IMPLIKASINYA TERHADAP IMPLEMENTASI REVOLUSI MENTAL

Anita Trisiana, Sugiaryo, Rispantyo

Validator:
Prof. Dr. H.Tukiran Taniredja, Prof. Dr. H. Masrukhi, M.Pd., Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd.

Desain Cover :
Herlambang Rahmadhani

Sumber :
https://www.freepik.com/

Tata Letak :
Titis Yuliyanti

Proofreader :
Titis Yuliyanti

Ukuran :
viii, 71 hlm, Uk: 14x20 cm

ISBN :
978-623-209-764-3

Cetakan Pertama :
Juni 2019

Hak Cipta 2019, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2019 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan produk luaran penelitian dasar berupa panduan model Pendidikan Karakter Di Perguruan Tinggi Berbasis Nasionalisme Dan Implikasinya Terhadap Implementasi Revolusi Mental. Panduan ini akan dikembangkan lagi sebagai acuan dalam menyusun Buku Ajar, yang diarahkan untuk pendidikan karakter. Perpaduan pengembangan model pembelajaran yang fokus dalam urutan langkah – langkah pembelajaran secara jelas, memberikan penguatan proses pembelajaran dalam menerapkan pendidikan karakter, yaitu mengintegrasikan karakter mahasiswa dengan memunculkan sikap intelektual yang menguatkan rasa "nasionalisme" sebagai perekat dalam perwujudan sikap spiritual dan sosial yang tampak dalam kompetensi pendidikan kewarga-negaraan, dan inilah yang merupakan kebaharuan serta nilai unggul dalam model Pendidikan Karakter Di Perguruan Tinggi Berbasis Nasionalisme Dan Implikasinya Terhadap Implementasi Revolusi Mental yang tim penulis kembangkan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam proses penyusunan produk luaran ini, menjadi bagian dari peningkatan mutu pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi pendidikan karakter di Perguruan Tinggi.

Saran, masukan, dan kritik akan lebih memberikan kesempurnaan, untuk itu penulis, merasa masih banyak kekurangan sehingga masukan dan saran diharapkan dari para pembaca.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB I PENGANTAR **1**

BAB II DASAR – DASAR PENGEVALUASIAN PROGRAM **6**

A. Latar Belakang dan Deskripsi Program 6
B. Komponen dan Sumber Daya Program 8
C. Sub Evaluasi (Proses, Hasil, Perbandingannya) 14

BAB III PENDIDIKAN KARAKTER **19**

A. Kegiatan Pendidikan Karakter di Kelas 23
B. Kegiatan Pendidikan Karakter di Luar Kelas 29
C. Konklusi Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter 32

BAB IV MODEL PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN **36**

A. Mekanisme Kebijakan Publik 41
B. Model Pendekatan Analisis Kebijakan Publik. 49
C. Meta Evaluasi Program Kebijakan Pendidikan Karakter 51

BAB V NASIONALISME DALAM IMPLEMENTASI REVOLUSI MENTAL 58
A. Ciri-Ciri Nasionalisme 60
B. Indikator Sikap Nasionalisme 60

BAB VI PENUTUP 63

GLOSARIUM 66

INDEKS 68

DAFTAR PUSTAKA 69

BAB I
PENGANTAR

Kebijakan nasional pendidikan karakter merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa yang diamanatkan oleh Presiden RI pada acara puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional, 11 Mei 2010. Kebijakan nasional pendidikan karakter dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada fase awal, pendidikan karakter difokuskan pada pembentukan, pembinaan, dan pengembangan nilai jujur, cerdas, tangguh, dan peduli. Dapat juga ditambahkan nilai-nilai lain yang relevan dan kontekstual sesuai dengan keperluan. Pada fase berikutnya dapat dikembangkan berbagai nilai antara lain bertanggung jawab, kreatif, disiplin, suka menolong.

Program pendidikan karakter tahun 2010 yang dimasukkan dalam RAN merupakan program khusus pendidikan karakter dan kegiatan yang sudah ada serta bermuatan pendidikan karakter. Pada tahun 2011 hanya program pendidikan karakter saja yang masuk dalam RAN pendidikan karakter. Program tersebut merupakan program

inovatif yang sesuai dengan renstra dan desain induk pendidikan karakter. Suatu program disebut inovatif jika memenuhi salah satu kriteria dari beberapa kriteria berikut ini:

1. Belum pernah dilakukan pada kegiatan tahun sebelumnya;
2. Berupa pemecahan masalah karakter bangsa saat ini dan yang akan datang;
3. Mengadaptasi model pendidikan karakter yang baik dari budaya daerah atau negara
4. Mengandung keunikan dan/atau keaslian;
5. Memiliki indikator kinerja kunci yang jelas dan operasional.

Program pendidikan karakter ini merupakan intensitas yang benar-benar harus dengan sengaja direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi. Program tersebut harus mempunyai dampak langsung (bukan dampak pengiring) terhadap pembentukan karakter. Kegiatan pendidikan karakter yang terintegrasi dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan lain (didanai oleh kegiatan pendidikan lain itu) tidak perlu dimasukkan dalam RAN. Program yang masuk dalam RAN 2011 dirancang dengan enam struktur program seperti yang tersebut di atas mulai dari harmonisasi kebijakan pendidikan karakter sampai dengan implementasi dan diseminasi pendidikan karakter.

Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa yang memiliki kebudayaan adiluhung. Masyarakatnya hidup rukun, ingat semboyan negara “Bhinneka Tunggal Ika” yang diambil dari sesanti pada zaman Majapahit “Bhinneka

Tunggal Ika Tan Hana Dharma Wangrwa" menunjukkan hidup penuh toleransi antar warga negara yang berbeda-beda. Hubungan sosial dihiasi perilaku sopan dan santun, saling menghargai, dan tenggang rasa. Namun kita dapat menyaksikan sendiri bahwa akhir-akhir ini begitu banyak sosok manusia Indonesia yang tampil penuh pamrih, tidak tulus ikhlas, tidak bersungguh-sungguh, senang yang semu, semakin lekat dengan tradisi ABS, tampil sebagai yes man, dan sifat-sifat buruk lainnya. Sifat dan sikap yang demikian itu akan termanifestasikan pada perilaku yang suka menyalahkan orang lain, senang menghujat dan tidak dapat dipegang janjinya, menjadi sosok yang pemarah, pendendam, tidak toleran, perilaku buruk dalam berkendaraan, praktik korupsi, premanisme, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab, menurunnya penghargaan kepada para pemimpin, dan sebagainya. Lebih jauh lagi kini antar anak bangsa saja sudah saling curiga mencurigai, misalnya dengan yang berbeda etnis, agama, dan kelas sosial. Mahatma Ghandi (dalam Soedarsono, 2010) mengurai sebagai 'tujuh dosa yang mematikan' (*the seven deadly sins*) yaitu (1) semakin merebaknya nilai-nilai dan perilaku memperoleh kekayaan tanpa bekerja (*wealth without work);* (2) kesenangan tanpa hati nurani (*pleasure without conscience*); (3) pengetahuan tanpa karakter (*knowledge without character*); (4) bisnis tanpa moralitas (*commerce without ethic);* (5) ilmu pengetahuan tanpa kemauan (*science without humanity*); (6) agama tanpa pengorbanan (*religion without sacrifice*); dan (7) politik tanpa prinsip *(politic without principle).*

Pertanyaan yang muncul adalah "apa yang salah dengan bangsa kita ini?"

Kondisi yang demikian itu merupakan indikasi hilangnya karakter yang akan mengarah pada kehilangan segalanya. Oleh karena itu, perlu disadari oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) termasuk seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan perhatian yang cukup signifikan untuk memulai kembali membangun karakter bangsa.

Pendidikan Karakter Bangsa di atas pada prinsipnya, merupakan pengembangan budaya dan karakter bangsa yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah. Oleh karena itu, guru dan sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa. Namun dalam kenyataannya masih banyak persoalan yang dihadapi oleh guru dalam mengimplementasikan pendidikan karakter itu sendiri, harapannya pendidikan karakter tidak hanya kebijakan sesaat yang digaungkan begitu hebat tapi akan dalam pelaksanaan khususnya dalam proses pembelajaran tidak tersentuh sama sekali karakter apa yang akan dikembangkan dan dicapai. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengupas persoalan ini, khususnya dalam perspektif **evaluasi program pendidikan**.

Makalah ini akan mengupas lebih dalam mengenai seluk beluk mengenai konsep pendidikan karakter, dan apakah pelaksanaan pendidikan karakter terkesan berjalan begitu saja, ataukah dalam pelaksanaannya dapat berhasil dengan baik. Dalam hal ini akan dikaitkan dengan **evaluasi**

program menurut pendekatan Michael Scriven. Dengan demikian analisis dalam makalah ini sangat penting sekali untuk dilakukan, sehingga ada *feedback* untuk memperbaiki pelaksanaan dari kebijakan mengenai pendidikan karakter itu sendiri.

BAB II
DASAR – DASAR PENGEVALUASIAN PROGRAM

A. Latar Belakang dan Deskripsi Program

Evaluasi, menurut Scriven, adalah aktivitas metodologis yang "secara sederhana terkandung dalam pengumpulan dan penggabungan antara data perbuatan/ pelaksanaan dengan sekumpulan skala target penilaian untuk menghasilkan nilai komparatif atau numerik, dan juga merupakan pembenaran terhadap (1) instrumen pengumpulan data, (2) pertimbangan, dan (3) seleksi tujuan." Catatan lain menyebutkan bahwa Scriven melihat evaluasi sebagai kegiatan yang mengacu kepada diri sendiri di mana evaluator harus mengevaluasi kinerjanya sekaligus memperoleh penilaian independen dari evaluasi tersebut. Mengingat betapa pentingnya tujuan evaluasi, Scriven menerangkan dua peran evaluasi berikut. Yang pertama, sumatif, yakni untuk membantu pengembangan program dan obyek-obyek lain. Kedua adalah formatif, berperan untuk menaksir nilai obyek segera setelah obyek tersebut berkembang. Dengan kata lain, jika suatu informasi digunakan untuk menuntun perkembangan, evaluasinya disebut formatif. Sementara jika informasi tersebut

digunakan untuk menyimpulkan nilai sesuatu, maka dinamakan evaluasi sumatif. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Relevansi 4 Jenis Evaluasi Terhadap Peran Evaluasi Formatif dan Sumatif

Peran Evaluasi	*Context*	*Input*	*Process*	*Product*
Evaluasi Formatif; Prospek aplikasi dari informasi CIPP membantu dalam pembuatan keputusan dan jaminan mutu	Petunjuk untuk mengidentifikasi intervensi yang dibutuhkan dan menyusun tujuan (berdasarkan penilaian kebutuhan, problem, *asset*, dan peluang)	Petunjuk untuk memilih program atau strategi lainnya (berdasarkan penilaian strategi alternatif dan rencana alokasi sumber daya), juga untuk menguji perencanaan kerja.	Petunjuk untuk mengimplementasikan rencana kerja, (berdasarkan pada *monitoring* dan kegiatan penilaian program)	Petunjuk untuk melanjutkan, memodifikasi, mengadopsi, atau menghentikan usaha (berdasarkan penilaian *outcome* dan dampak)
Peran Evaluasi	*Context*	*Input*	*Process*	*Product*
Evaluasi Sumatif; Penggunaan retrospektif dari CIPP bermaksud untuk mendapatkan manfaat program, kualitas, probitas, dan signifikansi-nya	Perbandingan tujuan dan prioritas untuk menilai kebutuhan, problem, *asset*, dan peluang	Perbandingan strategi program, desain dan keuangan terhadap kompetitor yang penting dan manfaat kebutuhan	Deskripsi secara penuh dari proses dan pembiayaan yang sebenarnya, plus perbandingan desain dan proses aktual, dan pembiayaan	Perbandingan *outcome* dan efek samping kebutuhan yang ditargetkan, untuk menghasilkan program yang kompetitif; interpretasi hasil terhadap upaya penilaian *context*, Input dan proses.

B. Komponen dan Sumber Daya Program

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab.

Pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila meliputi:(1) Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikir baik, dan perilaku baik. (2) Membangun bangsa yang berkarakter Pancasila. (3) Mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri bangga pada bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia (kemendiknas, 2011:7). Dalam konteks pendidikan karakter, kemampuan yang harus dikembangkan melalui persekolahan adalah berbagai kemampuan yang akan menjadikan manusia sebagai makhluk yang berketuhanan (tunduk patuh pada konsep ketuhanan) dan mengemban amanah sebagai pemimpin di dunia. Selain itu, pendidikan karakter harus diarahkan pada pembentukan watak.

Pendidikan karakter secara rinci memiliki lima (5) tujuan. Pertama, mengembangkan potensi kalbu/ nurani/ afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai universal karakter bangsa. Kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang

terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas, persahabatan, kebangsaan. Kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas, persahabatan, dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (Zubaedi, 2011:18).

Selain itu, pendidikan karakter memiliki tiga (3) fungsi utama. Pertama, fungsi pembentukan dan pengembangan potensi. Pendidikan karakter berfungsi membentuk dan mengembangkan potensi peserta didik agar berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Kedua, fungsi perbaikan dan penguatan. Pendidikan karakter berfungsi memperbaiki dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi warga negara dan pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Ketiga, fungsi penyaring. Pendidikan karakter berfungsi memilah budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat.

Pendidikan karakter berfungsi memilah budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Ketiga fungsi ini dilakukan melalui; (1) pengukuhan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, (2) pengukuhan nilai dan norma konstitusional UUD 45, (3) penguatan komitmen kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), (4) penguatan nilai-nilai keberagaman sesuai dengan konsepsi Bhineka Tunggal Ika, dan (5) penguatan keunggulan dan daya saing bangsa untuk keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia dalam konteks global.

Menurut Dony Kusuma, pendidikan karakter merupakan dinamika pengembangan kemampuan yang berkesinambungan dalam diri manusia untuk mengadakan internalisasi nilai-nilai sehingga menghasilkan disposisi aktif, stabil dalam diri individu. Dinamika ini membuat pertumbuhan individu menjadi semakin utuh. Unsur-unsur ini menjadi dimensi yang menjiwai proses formasi setiap individu. Pendidikan karakter sebagai sebuah program kurikuler telah dipraktikkan di sejumlah negara. Pendidikan karakter adalah segala upaya yang dilakukan guru, yang mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya. Pendidikan karakter dari sisi substansi dan tujuannya sama dengan pendidikan budi pekerti, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan

secara mendasar, karena membawa perubahan individu sampai ke akar-akarnya.

Berikut ini adalah dasar hukum sebagai landasan kebijakan pendidikan karakter menurut Jamal M (2011: 41), antara lain:

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Permendiknas No. 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan
5. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi
6. Permendiknas No. 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan
7. Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014
8. Renstra Kemendiknas Tahun 2010 – 2014
9. Renstra Direktorat Pembinaan SMP tahun 2010 – 2014

Mengambil analogi dari bangunan sebuah rumah agar kokoh harus ditopang oleh pilar yang kuat. Rumah dengan pilar yang kuat akan tahan dari terpaan angin maupun goncangan gempa sekalipun. Demikian juga pendidikan karakter, secara nasional, hendaknya ditopang oleh pilar yang kuat agar tidak mudah hilang tergerus arus perjalanan sejarah. Apa yang harus menjadi pilar nasional pendidikan karakter? Oleh karena pendidikan karakter sebagai bagian integral dari keseluruhan tatanan sistem pendidikan nasional, maka harus dikembangkan dan dilaksanakan

secara sistemik dan holistik dalam tiga pilar nasional pendidikan karakter, yaitu:(1) satuan pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, satuan/program pendidikan nonformal), (2) keluarga (keluarga inti, keluarga luas, keluarga orang tua tunggal), dan (3) masyarakat (komunitas, masyarakat lokal, wilayah, bangsa, dan negara). Hal ini juga konsisten dengan konsep tanggung jawab pendidikan nasional yang berada pada sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Indonesia Heritage Foundation merumuskan sembilan pilar karakter dasar yang menjadi tujuan pendidikan karakter. Kesembilan pilar tersebut meliputi: (cinta kepada Allah dan semesta beserta isinya, (2) tanggung jawab, disiplin dan mandiri, (3) jujur, (4) hormat dan santun, (5) kasih sayang, peduli, dan kerja sama, (6) percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah, (7) keadilan dan kepemimpinan, (8) baik dan rendah hati, dan (9) toleransi, cinta damai dan persatuan.

Sementara *Character Counts* di Amerika mengidentifikasikan bahwa karakter-karakter yang menjadi pilar yaitu: dapat dipercaya (*trustworthiness*), rasa hormat dan perhatian (*respect*), tanggung jawab (*responsibility*), jujur (*fairness*), peduli (*caring*), kewarganegaraan (*citizenship*), ketulusan (*honesty*), berani (*courage*), tekun(*diligence*), dan integritas (Ahmad Tafsir, 2011:43). Selanjutnya Ari Ginanjar dengan teori ESQ menyodorkan pemikiran adanya 7 karakter dasar, yaitu: (1) jujur, (2) tanggung jawab, (3) disiplin, (4) visioner, (5) adil, (6) peduli, dan (7) kerja sama.

Dari berbagai pendapat tentang pilar pendidikan karakter di atas, setiap pilar merupakan suatu entitas pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai (nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praksis) melalui proses intervensi dan habituasi. Apa yang dimaksud dengan proses intervensi? Intervensi adalah proses pendidikan karakter yang dilakukan secara formal, dikemas dalam interaksi belajar dan pembelajaran (*learning and instruction*) yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembentukan karakter dengan menerapkan berbagai kegiatan yang terstruktur (*structured learning experiences*). Proses intervensi dapat dilakukan oleh semua subjek pelajaran namun dengan penekanan yang berbeda. Melalui interaksi belajar dan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama harus melahirkan dua dampak sekaligus, yakni dampak instruksional (*instructional effect)* maupun dampak pengiring (*nurturant effect*), sedangkan interaksi belajar dan pembelajaran bidang lain cukup melahirkan dampak pengiring saja. Disamping itu, dalam interaksi belajar dan pembelajaran tersebut pendidik (guru, dosen, tutor, instruktur) sebagai pendidik yang mencerdaskan dan mendewasakan dan sekaligus harus bertindak sebagai sosok anutan (*role model*).

Habituasi adalah proses penciptaan aneka situasi dan kondisi (*persistent-life situation*) yang berisi aneka penguatan (*reinforcement*) yang memungkinkan peserta didik pada satuan pendidikannya, di rumahnya, di lingkungan masyarakatnya membiasakan diri berperilaku sesuai nilai dan menjadikan perangkat nilai yang telah

diinternalisasi dan dipersonalisasi melalui proses olah hati, olah pikir, olah raga, dan olah rasa dan karsa itu sebagai karakter atau watak. Sebagai contoh, karakter jujur, terbentuk dalam satu kesatuan utuh antara tahu makna jujur (apa dan mengapa jujur), mau bersikap jujur, dan berperilaku jujur. Karena setiap nilai berada dalam spektrum atau kluster nilai-nilai, maka secara psikologis dan sosial-kultural suatu nilai harus koheren dengan nilai lain dalam klusternya untuk membentuk karakter yang utuh. Misalnya, karakter jujur terkait pada nilai jujur, tanggung jawab, dan peduli. Peserta didik yang berperilaku jujur dalam mengerjakan soal ujian, artinya ia peduli terhadap penegakan disiplin dan peningkatan mutu pendidikan karena dengan perilakunya yang jujur tersebut dapat dibangun sportivitas, etos kerja keras, dan kemandirian. Karena itu jika kejujuran sudah tertanam pada sanubari dan 'merasuk merajasukma' (*personalized*) pada diri peserta didik tidak perlu adanya pengawas ujian dan tidak akan ada pihak yang mencari keuntungan dari jual beli naskah soal ujian maupun upaya membocorkan soal ujian. Sebaliknya jika kejujuran telah sirna adanya pengawas ujian sehebat apapun maupun penjagaan polisi seketat apapun menyontek pada saat ujian dan upaya pembocoran soal sampai kapan pun akan tetap menghiasi saat-saat ujian berlangsung.

C. Sub Evaluasi (Proses, Hasil, Perbandingannya)

Ada sementara kalangan pendidik mempersepsi pendidikan karakter sebagai suatu bahan pelajaran baru

yang tentu saja akan menambah materi baru dalam kurikulum satuan pendidikan. Persepsi itu tidak semuanya salah sebab kehadiran pendidikan karakter memang harus disambut dengan karya nyata para pendidik di satuan pendidikan untuk menyemai generasi muda yang berkarakter. Namun walaupun demikian kehadiran pendidikan karakter bukan dimaksudkan untuk menambah pelajaran baru melainkan menyempurnakan proses belajar dan pembelajaran yang ada agar menyentuh pengembangan karakter warganegara. Di samping itu, pengembangan karakter tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya satuan pendidikan. Oleh karena itu guru dan satuan pendidikan perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter kedalam Kurikulum (KTSP, silabus dan RPP) yang sudah ada.

Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan pendidikan karakter mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai karakter bangsa sebagai milik mereka dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. Dengan prinsip ini peserta didik belajar melalui proses berpikir, bersikap, dan berbuat. Ketiga proses ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam melakukan kegiatan sosial dan mendorong peserta didik untuk melihat diri sendiri sebagai makhluk sosial.

Karakter itu tidak dapat dikembangkan secara cepat dan segera *(instant*), tetapi harus melewati suatu proses yang panjang, cermat, dan sistemik. Berdasarkan perspektif yang berkembang dalam sejarah pemikiran manusia, pendidikan karakter harus dilakukan berdasarkan tahap-tahap perkembangan anak sejak usia dini sampai dewasa. Setidaknya, berdasarkan pemikiran psikolog Kohlberg (1992) dan ahli pendidikan dasar Marlene Lockheed (1990), terdapat empat tahap pendidikan karakter yang perlu dilakukan, yaitu (a) tahap "pembiasaan" sebagai awal perkembangan karakter anak, (b) tahap pemahaman dan penalaran terhadap nilai, sikap, perilaku dan karakter siswa; (c) tahap penerapan berbagai perilaku dan tindakan siswa dalam kenyataan sehari-hari; dan (d) tahap pemaknaan yaitu suatu tahap refleksi dari para siswa melalui penilaian terhadap seluruh sikap dan perilaku yang telah mereka pahami dan lakukan dan bagaimana dampak dan kemanfaatannya dalam kehidupan baik bagi dirinya maupun orang lain. Jika seluruh tahap ini telah dilalui, maka pengaruh pendidikan terhadap pembentukan karakter peserta didik akan berdampak secara berkelanjutan (*sustainable*). Berdasarkan hal tersebut, maka program pendidikan karakter perlu dikembangkan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

a. Berkelanjutan. Mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter bangsa merupakan sebuah proses panjang dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan. Sejatinya, proses tersebut dimulai dari kelas satu SD

atau tahun pertama dan berlangsung paling tidak sampai kelas 9 atau kelas terakhir SMP. Pendidikan karakter bangsa di SMA adalah kelanjutan dari proses yang telah terjadi selama 9 tahun.

b. Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya satuan pendidikan. Mensyaratkan bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter bangsa dilakukan melalui kegiatan kurikuler setiap mata pelajaran, kurikuler dan ekstra kurikuler. Pembinaan karakter melalui kegiatan kurikuler mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama harus sampai melahirkan dampak instruksional (*instructional effect*) dan dampak pengiring (*nurturant effect*), sedangkan bagi mata pelajaran lain cukup melahirkan dampak pengiring.

c. Nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan (*value is neither cought nor taught, it is learned*) (Hermann, 1972) mengandung makna bahwa materi nilai-nilai dan karakter bangsa bukanlah bahan ajar biasa. Tidak semata-mata dapat ditangkap sendiri atau diajarkan, tetapi lebih jauh diinternalisasi melalui proses belajar. Artinya, nilai-nilai tersebut tidak dijadikan pokok bahasan yang dikemukakan seperti halnya ketika mengajarkan suatu konsep, teori, prosedur, atau pun fakta seperti dalam mata pelajaran tertentu.

d. Proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Prinsip ini menyatakan bahwa proses pendidikan karakter dilakukan oleh peserta didik bukan oleh guru. Guru menerapkan prinsip "*tut*

wuri handayani" dalam setiap perilaku yang ditunjukkan peserta didik. Prinsip ini juga menyatakan bahwa proses pendidikan dilakukan dalam suasana belajar yang menimbulkan rasa senang dan tidak indoktrinatif.

Meminjam terminologi yang dipergunakan David Kerr (1999), pada saat menjelaskan isi dan modus *Citizenship Education*, maka proses pembelajaran pendidikan karakter hendaknya dilakukan secara inklusif pada pembelajaran semua mata pembelajaran di kelas, luar kelas, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Pengembangan proses pembelajaran yang demikian dimaksudkan untuk menghindarkan pendidikan karakter dari sifat yang eksklusif dimana upaya pembinaan karakter hanya dilakukan oleh mata pelajaran tertentu sementara pelajaran maupun program pendidikan lain di sekolah maupun luar sekolah termasuk di keluarga dan masyarakat tidak menyentuhnya sama sekali. Berikut ini beberapa implementasi pendidikan karakter di sekolah.

BAB III
PENDIDIKAN KARAKTER

Pendidikan karakter telah menjadi polemik di berbagai negara. Pandangan pro dan kontra mewarnai diskursus pendidikan karakter sejak lama. Sejatinya, pendidikan karakter merupakan bagian esensial yang menjadi tugas sekolah, tetapi selama ini kurang perhatian. Akibat minimnya perhatian terhadap pendidikan karakter dalam ranah persekolahan, sebagaimana dikemukakan Lickona telah menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit sosial di tengah masyarakat. Idealnya, sekolah tidak hanya berkewajiban meningkatkan pencapaian akademis, tetapi juga bertanggung jawab dalam membentuk karakter peserta didik. Namun, tuntutan ekonomi dan politik pendidikan menyebabkan penekanan pada pencapaian akademis mengalahkan idealitas peran sekolah dalam pembentukan karakter.

Pendidikan karakter diartikan sebagai *the deliberate us of all dimensions of school life to foster optimal character development* (usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah untuk membantu pengembangan karakter dengan optimal). Hal ini berarti untuk mendukung perkembangan karakter peserta didik harus melibatkan seluruh komponen di sekolah baik dari aspek isi (*the content of the curriculum*), proses pembelajaran (*the procces*

of instruction), kualitas hubungan (*the quality of relationships*), penanganan mata pelajaran (*the handling of discipline*), pelaksanaan aktivitas ko-kurikuler, serta etos seluruh lingkungan sekolah (Zubaedi, 2011:14).

Menurut David Elkind dan Freddy Sweet (dalam Zubaedi, 2011:15*) character education is the deliberate effort to help people understand, care about, and act upon core ethical value* (pendidikan karakter adalah usaha sengaja (sadar) untuk membantu manusia memahami, peduli, dan melaksanakan nilai-nilai etika inti). Ketika kita berpikir tentang jenis karakter yang kita inginkan bagi anak-anak, maka jelas bahwa kita mengharapkan mereka mampu menilai apakah kebenaran, peduli secara sungguh-sungguh terhadap kebenaran, dan kemudian mengerjakan apa yang diyakini sebagai kebenaran, bahkan ketika menghadapi tekanan dari luar dan upaya dari dalam.

Pendidikan karakter menurut Ratna Megawangi (2004:95), merupakan sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Definisi lain dikemukakan oleh Fakry Gaffar (2010:10) bahwa pendidikan karakter merupakan transformasi nilai-nilai kehidupan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang itu.

Dalam *grand* desain pendidikan karakter, pendidikan karakter merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan nilai-nilai luhur dalam lingkungan satuan

pendidikan (sekolah), lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Nilai luhur ini berasal dari teori pendidikan, psikologi pendidikan, nilai-nilai sosial budaya, ajaran agama, Pancasila dan UUD 45, dan UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta pengalaman terbaik dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembudayaan dan pemberdayaan nilai-nilai luhur ini juga didukung oleh komitmen dan kebijakan pemangku kepentingan serta pihak-pihak terkait lainnya termasuk dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan.

Pendidikan karakter dipahami sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi jati dirinya, diwujudkan dalam interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, antar sesama, dan lingkungannya. Nilai-nilai luhur tersebut antara lain: kejujuran, kemandirian, sopan santun, kemuliaan sosial, kecerdasan berpikir termasuk kepenasaran akan intelektual, dan berpikir logis. Oleh karena itu, penanaman pendidikan karakter tidak bisa hanya sekadar mentransfer ilmu pengetahuan atau melatih suatu keterampilan tertentu. Penanaman pendidikan karakter perlu proses, contoh teladan, dan pembiasaan atau pembudayaan dalam lingkungan peserta didik dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat maupun lingkungan (*exposure*) media massa.

Karakter didefinisikan oleh Ryan dan Bohlin (dalam Ahmad Tafsir, 2011) mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai

kebaikan (*loving the good*), dan melakukan kebaikan (*doing the good*). Dalam pendidikan karakter kebaikan itu sering kali dirangkum dalam sederet sifat-sifat baik. Dengan demikian, maka pendidikan karakter adalah upaya untuk membimbing perilaku manusia menuju standar baku. Upaya ini juga memberi jalan untuk menghargai persepsi dan nilai-nilai pribadi yang ditampilkan di sekolah. Fokus pendidikan karakter adalah pada tujuan etika, tetapi praktiknya meliputi penguatan kecakapan yang penting yang mencakup perkembangan sosial siswa.

Homby dan Parnwell (dalam Ahmad Tafsir, 2011) karakter adalah kualitas mental, kekuatan moral, nama atau reputasi. Hermawan Kertajaya mendefinisikan karakter adalah "ciri khas" yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut dan merupakan mesin pendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berujar, dan merespon sesuatu.

Istilah karakter dan kepribadian atau watak sering digunakan secara bertukar-tukar, tetapi Alport menunjukkan kata watak berarti normatif, serta mengatakan bahwa watak adalah pengertian etis dan menyatakan bahwa *character is personality evaluated and personality is character devaluated* (watak adalah kepribadian dinilai, dan kepribadian adalah watak yang tak dinilai). Karakter adalah watak, sifat, atau hal-hal yang memang sangat abstrak yang ada pada diri seseorang.

Dinamika pemahaman pendidikan karakter berproses melalui tiga momen: momen historis, momen reflektif, dan

momen praktis. *Momen historis*, yaitu usaha merefleksikan pengalaman umat manusia yang bergulat dalam menghidupi konsep dan praksis pendidikan khususnya dalam jatuh bangun mengembangkan pendidikan karakter bagi anak didik sesuai dengan konteks zamannya. *Momen reflektif*, sebuah momen yang melalui pemahaman intelektualnya manusia mencoba melihat persoalan metodologis, filosofis, dan prinsipil yang berlaku bagi pendidikan karakter. *Momen praktis*, yaitu dengan bekal pemahaman teroretis konseptual itu, manusia mencoba menemukan secara efektif agar proyek pendidikan karakter dapat efektif terlaksana di lapangan (Masnur Muslich, 2011).

Pendidikan karakter sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa mendesak untuk diterapkan. Pendidikan karakter menjadi vital dan tidak ada pilihan lagi untuk mewujudkan Indonesia baru yaitu Indonesia yang dapat menghadapi tantangan regional dan global.

A. Kegiatan Pendidikan Karakter di Kelas

Di kelas dapat dilakukan dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) maupun pelajaran lain. Khusus bagi PKn yang secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral hendaknya melahirkan dua dampak sekaligus, yakni dampak instruksional maupun dampak pengiring. Dampak instruksional adalah pengaruh langsung dari proses belajar dan pembelajaran yang biasanya

dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Misalnya setelah peserta didik mempelajari topik demokrasi mereka dapat (1) mengidentifikasi dasar-dasar demokrasi (*foundation of democracy*) secara universal yang dapat diterima semua negara di dunia (ranah kognitif); (2) membedakan praktik demokrasi di berbagai negara berdasarkan latar belakang sejarah, ideologi, dan tujuan nasional masing-masing (ranah kognitif); (3) meyakini keunggulan sistem pemerintahan demokrasi dibandingkan dengan sistem pemerintahan otoritarianisme maupun sistem pemerintahan komunisme (ranah afektif); (4) menerapkan pola hidup demokratis dalam proses pengambilan keputusan (ranah psikomotor).

Dampak pengiring adalah pengaruh ikutan setelah peserta didik melakoni pengalaman belajar tertentu, seperti misalnya menjadi lebih peka terhadap masalah yang ada di lingkungannya, menjadi lebih toleran terhadap pandangan yang beragam, lebih kreatif, dan inovatif. Dampak pengiring akan lahir jika dan hanya jika peserta didik memiliki pengalaman belajar (*learning experience*) optimal yang mampu merangsang seluruh potensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Atas dasar pandangan demikian maka proses pembelajaran konvensional yang memposisikan peserta didik laksana botol kosong yang harus diisi ilmu pengetahuan dan pendidik bertindak sebagai satu-satunya sumber belajar, serta belajar hanya dibatasi oleh dinding kelas, tidak memberikan cukup pengalaman belajar. Pada konteks perlunya melahirkan dampak pengiring itulah kita mendambakan lahirnya model pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang ada di

kelas dan di luar kelas. Berikut ini beberapa contoh implementasi pendidikan karakter di kelas.

1. *Healtier food in school* (Tim USA)

Para siswa sekolah menengah dari kota Vancouver, USA ini menyadari adanya masalah berkenaan dengan makanan yang tidak sehat yang mereka konsumsi sehari-hari, termasuk yang terdapat di kantin sekolah. Mereka berasumsi bahwa makanan yang tidak sehat seperti itulah yang mengakibatkan semakin banyaknya orang Amerika yang kegemukan. Bukan hanya itu mereka pun mengkhawatirkan bahwa karena kebanyakan meng-konsumsi makanan yang mereka namakan *Junk Food* tersebut berbagai penyakit mematikan pun kerapkali muncul, seperti penyakit jantung koroner dan kanker. Selanjutnya mereka membentuk tim peneliti untuk melakukan survei guna memperoleh jawaban untuk memecahkan masalah tersebut. Mula-mula tim peneliti melakukan wawancara dengan ahli gizi sekolah untuk memperoleh jawaban bagaimana menyiapkan makanan sehat di sekolah, bukan *Junk Food*. Untuk memperoleh dukungan dari masyarakat, tim peneliti pun melakukan wawancara dengan sejumlah anggota masyarakat dari berbagai kalangan. Hasilnya sungguh menggembirakan, hampir sebagian besar anggota masyarakat menyetujui gagasan untuk melarang kantin sekolah menyajikan *Junk Food*. Selanjutnya diadakan kunjungan terhadap pejabat dinas pendidikan setempat untuk memberikan dorongan agar mengeluarkan kebijakan publik yang mengikat sekolah agar menyajikan makanan sehat. Proyek belajar ini sangat

menarik karena memberikan pengalaman belajar langsung kepada para siswa. Dampak pengiring dari proses pembelajaran ini adalah melatih kepekaan siswa terhadap persoalan-persoalan yang terdapat di lingkungannya dan melatih keterampilan berpartisipasi.

2. *Restore historic monuments* (Tim India)

Para siswa dari India menyajikan proyek belajarnya dengan topik memperbaiki monumen bersejarah. Di kota tempat mereka tinggal, New Delhi terdapat sejumlah monumen bersejarah yang terlantar, tidak terawat dan sepertinya tidak ada pihak yang bertanggung jawab memeliharanya. Mereka kemudian mengunjungi sejumlah pejabat setempat yang diperkirakan memiliki kaitan dengan keberadaan monumen tersebut untuk meminta perhatiannya agar melakukan langkah-langkah untuk memperbaikinya. Namun jawaban tidak memuaskan tim peneliti, semuanya serba klise dan saling lempar tanggung jawab. Para pejabat daerah mengatakan bahwa tugas merawat dan memperbaiki monumen bersejarah berada di tangan pemerintah pusat. Selanjutnya tim melakukan wawancara dengan anggota masyarakat untuk memperoleh tanggapan tentang perlunya mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Umumnya mereka sependapat bahwa pemerintah mesti bertanggung jawab terhadap keberadaan monumen bersejarah tidak boleh menterlantarkannya. Para siswa justru memberikan pemahaman lain bahwa dalam menghadapi persoalan seperti itu anggota masyarakat tidak boleh tinggal diam,

harus bahu-membahu bersama pemerintah untuk memperbaiki monumen bersejarah yang terlantar itu. Selanjutnya tim melakukan kegiatan pembinaan pada anak-anak sekolah dasar untuk mencintai monumen bersejarah di daerahnya melalui lomba menggambar dengan objek monumen bersejarah. Melalui kegiatan ini para siswa belajar bagaimana menjadi bagian dari solusi bukan bagian dari persoalan. Sosok generasi muda yang demikianlah yang dapat menatap masa depan lebih optimis.

3. *Acces to clean water* (Tim Senegal)

Tim siswa dari sebuah desa kecil Ross Bethio, Senegal ini mengajukan masalah kesulitan memperoleh air bersih. Mereka menyaksikan keadaan dimana masyarakat mengambil air untuk keperluan hidup sehari-hari dari sebuah kubangan air yang jaraknya sekitar 26 kilometer dari desa mereka. Disamping jaraknya yang jauh, sumber air itupun tidak sehat karena terkontaminasi oleh sampah dan kotoran hewan. Akibatnya banyak anggota masyarakat yang terjangkit berbagai penyakit, seperti kolera, kudis, dan penyakit kulit lainnya. Para siswa menyadari bahwa persoalan tersebut perlu dipecahkan dan selanjutnya mereka melakukan survei untuk mencari solusi terbaik. Pertama-tama tim peneliti berkunjung pada tokoh agama setempat untuk memperoleh dukungan. Selanjutnya mereka berkunjung kepada otoritas setempat untuk menanyakan apa yang telah dan akan dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut. Para siswa memperoleh informasi bahwa pemerintah telah mulai membangun tower

air untuk menyuplai air ke Ross Bethio, namun proyek tersebut terbengkalai dan tak kunjung selesai walaupun sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya dengan alasan tidak cukup dana. Untuk memberi tekanan kepada pemerintah setempat agar serius menyelesaikan pembangunan tower air, tim mengorganisasikan sebuah demonstrasi damai yang diikuti seluruh siswa pada sekolah mereka menuju kantor otoritas Ress Bethio. Dengan kegigihan yang luar biasa dalam meyakinkan pemerintah bahwa solusi terbaik untuk memperoleh akses air bersih adalah penyelesaian pembangunan tower air, akhirnya otoritas setempat memulai lagi mengerjakan proyek tersebut. Dari kegiatan ini para siswa memperoleh pengalaman belajar bahwa dengan kegigihan dan kerja keraslah sesuatu dapat diraih.

4. *School violence* (Tim Jordan)

Para siswa sekolah menengah di kota Al Karak, Jordan mengangkat topik untuk proyek belajar mereka adalah kekerasan di sekolah. Para siswa mengamati bahwa di daerahnya sering kali terjadi peristiwa tersebut, utamanya di sekolah dasar baik yang dilakukan oleh guru maupun oleh temannya di sekolah. Pertama-tama mereka melakukan survei ke sekolah-sekolah untuk memperoleh keterangan sekitar ada atau tidak adanya kekerasan di sekolah melalui serangkaian wawancara mendalam dengan para siswa. Selanjutnya tim menyebarkan angket kepada orang tua siswa untuk menjaring data mengenai kasus kekerasan di sekolah yang menimpa anak-anak mereka. Hasilnya sangat

mengejutkan bahwa banyak dari orang tua kerapkali mendapatkan anak-anak mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar memperoleh perlakuan yang tidak semestinya dari gurunya terutama pada saat mereka diberi hukuman. Tim peneliti pun melakukan wawancara kepada anggota masyarakat untuk menggali pandangan masyarakat mengenai solusi apa yang dapat dipilih untuk menanggulangi kekerasan di sekolah tersebut. Dari kegiatan ini para siswa memperoleh keyakinan bahwa dalam memberikan hukuman perlu dipilih yang sifatnya mendidik (edukatif), tidak menggunakan hukuman fisik maupun nonfisik yang dapat menyakiti badan maupun jiwa anak. Disamping itu mereka pun belajar bagaimana memberi rasa empati kepada penderitaan orang lain. Siswa yang memperoleh hukuman fisik maupun nonfisik yang tidak mendidik akan mengalami luka hati maupun luka badan yang serius. Oleh karena itu, dengan berempati mereka akan lebih memiliki kepekaan untuk memperlakukan orang lain lebih baik dan lebih manusiawi.

B. Kegiatan Pendidikan Karakter di Luar Kelas

Pembinaan karakter siswa jangan hanya dilakukan di dalam kelas ketika pelajaran berlangsung, melainkan harus dilanjutkan di luar kelas melalui kegiatan pembiasaan hidup berkarakter. Program inklusi yang dilakukan semua mata pelajaran di kelas tampaknya perlu dilanjutkan hingga di luar kelas dengan cara melakukan pembagian tanggung jawab pembinaan perilaku untuk setiap mata pelajaran.

Beberapa contoh berikut dapat dijadikan sekedar model pembagian tanggung jawab dimaksud.

1. Guru PKn berkonsentrasi untuk membina siswa agar berperilaku tertib pada saat mengikuti upacara bendera. Tindakan nyata yang perlu dilakukan adalah memberikan pemahaman makna upacara bendera, mengawasi pada saat pelaksanaannya, hingga berpartisipasi dalam melatih petugas upacara bendera.
2. Guru Pendidikan Agama berkonsentrasi untuk membina siswa agar taat melaksanakan ibadat di sekolah. Tindakan nyata yang perlu dilakukan adalah menjadi teladan dalam menjalankan ibadat di sekolah, menciptakan suasana kondusif bagi pelaksanaan ibadat di sekolah, dan sebagainya.
3. Guru Biologi berkonsentrasi untuk membina siswa agar memiliki kesadaran lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan; tidak mencoreti bangku, dinding sekolah, dan dinding WC; tidak mengganggu tanaman, bunga, dan pohon. Tindakan nyata yang dapat dilakukan adalah mempelopori pembuatan taman sekolah dimana setiap kelas memiliki taman binaannya masing-masing; mengawasi kebersihan kelas dan lingkungan; dan sebagainya.
4. Guru Fisika berkonsentrasi terhadap upaya pengembangan daya kreativitas siswa. Tindakan nyata yang harus dilakukan adalah mengubah gaya mengajarnya yang deduktif pada gaya mengajar yang induktif. Kreativitas akan muncul mengikuti gaya

induktif dimana para siswa dibiasakan memecahkan suatu persoalan dari data yang disajikan bukan sebaliknya pembelajaran diawali dari menghafal hukum atau dalil.

5. Guru Sosiologi berkonsentrasi untuk membina siswa agar pandai bergaul dan beradaptasi di sekolah. Tindakan nyata yang perlu dilakukan adalah mengawasi pergaulan siswa di sekolah, utamanya kelompok-kelompok teman sebaya jangan sampai muncul geng-geng yang destruktif seperti geng motor.
6. Guru Ekonomi berkonsentrasi terhadap upaya pembinaan siswa agar menjadi insan yang jujur dan memiliki jiwa kewirausahaan. Tindakan nyata yang perlu dilakukan adalah menggagas berdirinya Kantin Kejujuran dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat memupuk jiwa kewirausahaan.
7. Guru Pendidikan Jasmani dan Olah Raga Kesehatan berkonsentrasi untuk membina siswa agar memiliki kepedulian terhadap kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungannya. Tindakan nyata yang perlu dilakukan seperti menggagas perlombaan usaha kesehatan sekolah, kompetisi olah raga kesehatan, dan sebagainya.
8. Guru Matematika berkonsentrasi untuk membina siswa agar memiliki kekonsistenan penalaran logis-matematis, berbahasa yang tidak ambigu istilah, ungkapan, definisi, pernyataan. Tindakan nyata yang perlu dilakukan adalah membuat terobosan-terobosan program tentang kebergunaan matematika di luar

matematika—dapat dipakai untuk kebutuhan ilmu dan pengetahuan lain.

9. Guru bahasa Indonesia berkonsentrasi terhadap upaya membina siswa agar mahir berbahasa Indonesia baku, berbahasa santun, dan sebagainya. Tindakan nyata yang dapat dilakukan seperti menyelenggarakan bulan bahasa yang diisi dengan berbagai perlombaan berbahasa yang baik.

Keberhasilan pendidikan karakter dapat diketahui melalui beberapa faktor pendukung sebagai berikut: Mengamalkan ajaran agama sesuai dengan tahap perkembangan remaja, Memahami kekurangan dan Kelebihan diri sendiri, Menunjukkan sikap percaya diri, Mematuhi aturan – aturan sosial yang berlaku di lingkungan yang lebih luas, Menghargai keberagaman beragama, Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif, Terbentuknya budaya sekolah yang kondusif.

Namun demikian ada beberapa faktor penghambat sebagai bagian dari kegagalan pendidikan karakter, antara lain: Adanya pengaruh negatif Televisi, Dampak pergaulan bebas, Dampak buruk tempat wisata, Menggaungkan Hedonisme, Hilangnya jiwa perjuangan dan pengabdian, Lebih suka menjadi konsumen dari pada produsen, Suka memburu tren negatif.

C. Konklusi Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter

Menurut Jones yang dikutip Van Meter (1994: 67) Implementasi diartikan sebagai "*Getting the job done and*

doing it". Menurut Jones untuk melaksanakan implementasi diperlukan adanya syarat antara lain adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional, yang mana hal ini sering disebut sebagai *resources*. Lebih lanjut Jones mengemukakan batasan implementasi sebagai *process of getting additional resources so as to figure out what is to be done*. Dalam hal ini implementasi merupakan proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan.

Definisi implementasi tersebut kurang lebih merupakan suatu tahap dari kebijaksanaan yang terdiri dari dua macam tindakan yaitu, pertama; merumuskan tindakan yang dilakukan, kedua; melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi.

Sedangkan menurut Van Meter dalam (Budi Winarno, 2002: 100) memberikan batasan definisi implementasi sebagai berikut:

> *Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set fort in prior policy decisions. This includes both one time efforts to transform decisions into operasional term, as well as continuing efforts to achieve the large and small change mandated by policy decisions.*
>
> "Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan–tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta, yang diharapkan untuk mencapai tujuan–tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan – tindakan ini, pada suatu saat

> berusaha untuk mentransformasikan keputusan–keputusan menjadi pola–pola operasional, serta melanjutkan usaha–usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan – keputusan kebijakan tertentu".

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut James P. Lester dan Joseph Stewart (Budi Winarno, 2002: 101) menyatakan bahwa:

> Implementasi kebijakan dapat dipandang dalam pengertian yang luas, yang merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama–sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan, sedangkan implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil.

Sementara itu, Van Meter dan Van Horn (Budi Winarno, 2002: 102) membatasi Implementasi kebijakan "sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu – individu atau kelompok – kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan–keputusan kebijakan sebelumnya".

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber–sumber yang di dalamnya termasuk manusia, dana, dan kemampuan, organisasioanal, yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun swasta (individu dan kelompok), untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB IV
MODEL PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

1) Van Meter dan Van Horn (Budi Winarno, 2002: 111) menawarkan suatu model proses Implementasi Kebijakan yang mempunyai enam Variabel yang membentuk ikatan (*linkage*) antara kebijakan dan pencapaian (*performance*). Variabel – variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a) Ukuran – ukuran dasar dan tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor – faktor yang menentukan pencapaian kebijakan. Ukuran – ukuran dasar dan tujuan kebijakan berguna di dalam menguraikan tujuan–tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Di samping itu Ukuran – ukuran dasar dan tujuan kebijakan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus.

b) Sumber – sumber kebijakan

Sumber – sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber – sumber yang dimaksud mencakup dana

atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan – kegiatan pelaksanaan.

Komunikasi di dalam dan antara organisasi – organisasi merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan sulit dalam meneruskan pesan – pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpannya atau menyebarluaskannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

d) Karakteristik badan – badan pelaksana

Karakteristik badan – badan administratif berkaitan dengan struktur birokrasi yakni karakteristik – karakteristik, norma – norma dan pola – pola hubungan yang terjadi berulang – ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

e) Kondisi – kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi – kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan pusat perhatian yang besar dalam mengidentifikasikan pengaruh variabel – variabel lingkungan dari hasil – hasil kebijakan.

f) Kecenderungan pelaksana (*implementers*)

Berkaitan dengan kemampuan dan keinginan dari pelaksana kebijakan dalam menerapkan kebijakan itu sendiri, seperti; kognisi (komprehensi, pemahaman)

tentang kebijakan, macam tanggapan (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

2) Sedangkan menurut Edwards (Budi Winarno, 2002: 114) studi implementasi kebijakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi – konsekuensi kebijakan bagi masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain:

a. Komunikasi

Secara umum proses komunikasi kebijakan terdiri dari:

1) Transmisi

Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, maka ia harus menyadari bahwa keputusan dan perintah untuk pelaksanaannya telah dibuat dan dikeluarkan, sehingga hambatan yang timbul dalam mengimplementasikan perintah dapat ditekan sekecil mungkin. Hambatan – hambatan tersebut antara lain:

(a) Pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan.

(b) Informasi melewati berlapis–lapis hierarki birokrasi.

(c) Pada akhirnya penangkapan komunikasi dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan–persyaratan suatu kebijakan.

2) Kejelasan

Jika kebijakan–kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga harus dikomunikasikan secara jelas.

3) Konsistensi

Jika implementasi kebijakan ingin berjalan secara efektif, maka perintah–perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

b. Sumber – sumber

Sumber – sumber merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, yang meliputi: Staf yang mewadahi serta keahlian – keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas mereka, wewenang dan fasilitas – fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul – usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan – pelayanan publik.

c. Kecenderungan – kecenderungan

Jika pelaksana kebijakan bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu maka proses pelaksanaan kebijakan menjadi semakin mudah.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan merupakan pelaksana kebijakan.

Ada beberapa karakteristik birokrasi yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin (Budi Winarno, 2002: 148) yaitu:

1) Birokrasi dimana pun berada dipilih sebagai instrumen sosial yang ditujukan untuk masalah yang definisikan sebagai urusan publik.
2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam pelaksanaan program kebijakan, yang tingkat kepentingannya berbeda untuk masing – masing tahap.
3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang luas dan kompleks.
5) Birokrasi jarang mati, naluri untuk bertahan hidup tidak perlu dipertanyakan lagi.
6) Birokrasi bukan merupakan sesuatu yang netral dalam pilihan – pilihan kebijakan mereka, tidak juga secara penuh dikontrol oleh kekuatan–kekuatan yang berasal dari luar dirinya.

e. Pengaruh struktur organisasi bagi implementasi (SOP)

Struktur organisasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting dalam implementasi.. Salah satu dari aspek – aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur – prosedur kerja ukuran dasarnya (*Standard Operating Procedures*, SOP). SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara–cara kerja baru atau tipe–tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan. Di samping itu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara–cara yang lazim dari suatu organisasi,

semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

A. Mekanisme Kebijakan Publik

Menurut Amin Ibrahim (2004: 3 - 4) ada berbagai acuan yang digunakan dalam menentukan kebijakan publik antara lain:

1) Perundang – undangan yang berlaku
2) Harus memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
   a) Re - Inventing Government, yaitu dengan:
      (1) Pemerintah harus mampu mengarahkan ketimbang mengayuh.
      (2) Pemerintah milik masyarakat (memberi wewenang ketimbang melayani).
      (3) Pemerintah yang kompetitif (menyuntikkan persaingan kedalam pemberian pelayanan).
      (4) Pemerintah yang digerakkan oleh misi.
      (5) Pemerintah yang berorientasi pada hasil.
      (6) Pemerintah dengan prinsip wirausaha (ketimbang membelanjakan).
      (7) Pemerintahan antisipatif (mencegah dari pada mengobati).
      (8) Pemerintahan Desentralisasi.
      (9) Pemerintahan yang berorientasi pada pasar (mendongkrak perubahan melalui pasar).
   b) Good Governance
      (1) Mengikutsertakan semua.
      (2) Transparan dan bertanggungjawab.
      (3) Efektif dan adil.

(4) Menjamin adanya supremasi hukum.
(5) Menjamin bahwa prioritas di bidang politik, sosial, ekonomi, didasarkan pada konsensus masyarakat.
(6) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut alokasi sumber dana pembangunan.
(7) Visi strategis pemimpin serta masyarakat yang mampu melihat ke depan dari suatu pemerintahan yang baik, bahwa pembangunan adalah untuk manusia (kelayakan sosial).

c) Demokratis (Sejauh mungkin mengikut sertakan *stakeholder* pembangunan baik dalam proses pelaksanaan maupun pengawasannya). Atau lebih bersifat *Bottom Up* (*Bottom Up* dan *Top Down* bertemu di suatu titik dengan lebih banyak memperhatikan aspirasi masyarakat).
d) Kondisi lingkungan strategis.
   (1) Kecenderungan dalam negeri.
   (2) Kecenderungan regional / kawasan.
   (3) Kecenderungan global.
e) Aspirasi yang berkembang dalam masyarakat
f) Otonomi Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah semua acuan tersebut terpenuhi, maka menurut Amin Ibrahim (2004: 5 – 8) dalam perumusan pembuatan kebijakan publik, maka langkah selanjutnya

adalah model mekanisme kerja yang akan dipakai dalam menentukan kebijakan, antara lain:

Bagan 1
Model I: Mekanisme Kerja

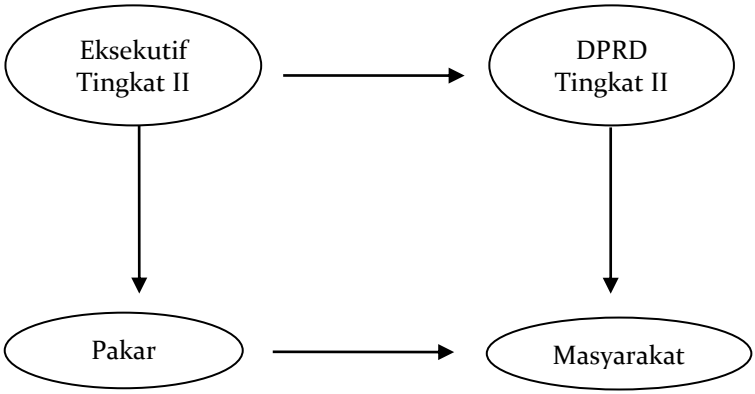

Dengan model ini pihak eksekutif (birokrasi) sebagai pengambil prakarsa dengan meminta pendapat pihak Legislatif dan para pakar. Pihak Eksekutif dapat memanfaatkan pendapat para pakar (dapat tidak sama dengan yang diminta pendapatnya oleh Eksekutif, dapat bersama- sama *berembug* dan ini akan lebih baik). Para pakarlah yang menggali masukan – masukan dari masyarakat. Model ini masih terkesan dominasi pihak Eksekutif, bermanfaat jika eksekutifnya berwibawa, didukung sepenuhnya Legislatif dan terutama baik untuk analisis kebijakan dan keputusan kebijakan publik yang bersifat teknis.

Bagan 2
Model II: Mekanisme Kerja

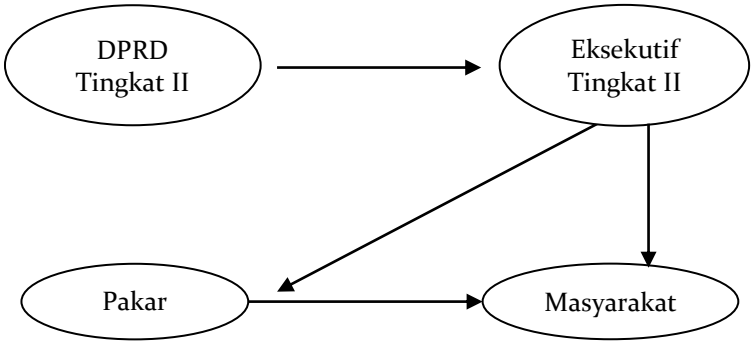

Dengan model ini unsur Legislatif sebagai pemrakarsa. Model ini cukup baik, jika pihak Legislatif jelas melihat peraturan – peraturan daerah kurang demokratis atau sudah ketinggalan zaman, sehingga perlu mengambil inisiatif untuk saran perubahannya (model ini paling jarang digunakan di masa lampau, baru sejak beberapa tahun terakhir saja, biasanya model pertama yang sering digunakan).

Bagan 3
Model III: Mekanisme Kerja

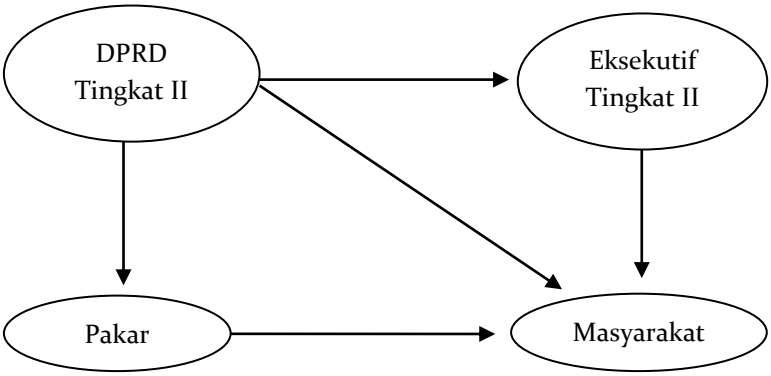

Model ini merupakan varian dari model I, dimana pihak Eksekutif dan Legislatif secara bersama melihat pentingnya kebijakan publik baru, atau mengubah yang lama. Selanjutnya prosesnya lebih banyak dikerjakan Eksekutif bersama tim pakarnya. Baik DPRD II maupun Eksekutif tingkat II sewaktu – waktu menerima atau mencari masukan dari masyarakat, sementara tim pakar berkewajiban menggali aspirasi masyarakat.

Bagan 4
Model IV: Mekanisme Kerja

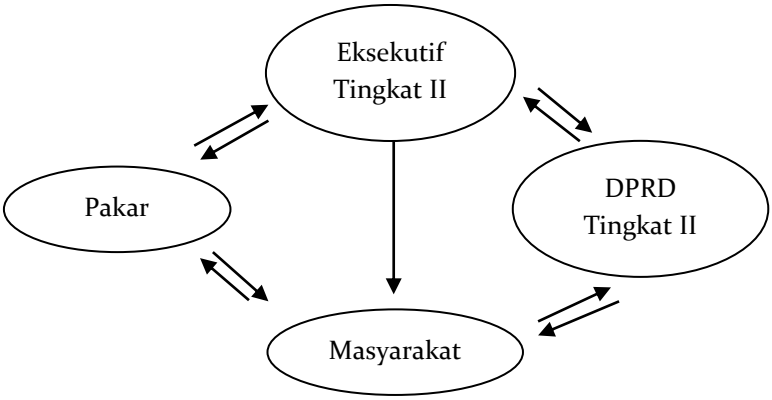

Model ini lebih sistematik dan inisiatif dapat datang dari pihak manapun termasuk inisiatif dari masyarakat (misalnya melalui LSM) dan dibahas bersama. Tim pakar dalam model ini dituntut bekerja keras karena berbagai pihak akan bertukar pikiran dengan Tim, karena itu sebaiknya Tim pakar bersifat dinamis, merupakan kumpulan pakar dari berbagai unsur.

Secara ideal model IV lebih komprehensif integral, lebih berstruktur tapi ini lebih membutuhkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik dari berbagai unsur (Eksekutif, Legislatif, LSM, dan tentu saja Tim pakarnya).

Dari berbagai model mekanisme kerja tersebut akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung kualitas SDM

yang baik, terutama kualitas SDM suprastruktur politik, tetapi bukan berarti kualitas SDM infrastruktur harus diabaikan.

Model perumusan kebijaksanaan negara tidak hanya satu, tapi ada berbagai macam sesuai dengan kerangka berpikir pembuat model tersebut. Dari masing – masing model yang akan dikemukakan, tidak akan dianggap "paling baik", karena masing – masing model memberikan fokus perhatiannya pada aspek kehidupan politik yang berbeda.

Yehezkel Dror yang dikutip oleh Irfan Islamy (2000: 35) mengemukakan ada 7 (Tujuh) macam model pembuatan keputusan, yaitu:

a. Pure Rationality Model

Model ini memusatkan perhatiannya pada pengembangan suatu pola pembuatan keputusan yang ideal secara universal, dimana keputusan – keputusan tersebut harus dibuat setepat – tepatnya.

b. Economically Rational Model

Model ini sama dengan model yang pertama tetapi lebih ditekankan pada pembuatan keputusan yang paling ekonomis dan paling efesien.

c. Sequental – Decision Model

Model ini memusatkan perhatiannya pada pembuatan eksperimen dalam rangka menentukan pelbagai macam alternatif sehingga dapat dibuat suatu kebijaksanaan yang paling efektif.

d. Incremental Model

Model yang keempat ini berasal dari teorinya Charles E. Linblom yang terkenal dengan sebutan "*muddling*

through" menjelaskan bagaimana kebijaksanaan itu dibuat. Kebijaksanaan dibuat atas dasar "perubahan yang sedikit" dari kebijaksanaan – kebijaksanaan yang telah ada sebelumnya.

Jadi kebijaksanaan – kebijaksanaan yang lama dipakai sebagai dasar / pedoman untuk membuat kebijaksanaan yang baru.

e. Satisflying Model

Model ini didasarkan atas teori "*satisficing*" dari Herbert A. Simon. Pendekatannya dipusatkan pada proses pemilihan alternatif kebijaksanaan pertama yang paling memuaskan dengan tanpa bersusah payah menilai alternatif–alternatif lain.

f. Extra – Rational Model

Model ini didasarkan atas proses pembuatan keputusan yang sangat rasional untuk menciptakan metode pembuatan kebijaksanaan yang paling optimal.

g. Optimal Model

Ini adalah merupakan suatu model yang integratif (gabungan) yang memusatkan perhatiannya pada pengidentifikasian nilai – nilai, kegunaan praktis daripada kebijaksanaan dan masalah – masalahnya. Semuanya itu ditujukan untuk mengatasi masalah – masalah dengan memperhatikan alokasi sumber – sumber, penentuan tujuan yang hendak dicapai, peramalan hasil – hasil dan pengevaluasian alternatif – alternatif terbaik. Keputusan–keputusan dibuat atas dasar pilihan – pilihan alternatif yang dapat diterima (*acceptable*).

B. Model Pendekatan Analisis Kebijakan Publik.

Dalam menentukan kebijakan publik ada beberapa model pendekatan analisis kebijakan publik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Budi Winarno (2002: 36 – 38), yaitu:

1) Pendekatan Kelompok

Secara garis besar ini menyatakan bahwa pembuatan kebijakan pada dasarnya merupakan hasil dari perjuangan antara kelompok – kelompok dalam masyarakat .Suatu kelompok merupakan kumpulan individu – individu yang diikat oleh tingkah laku atau kepentingan yang sama. Kebijakan publik pada suatu waktu tertentu dalam pandangan ini merupakan equilibrium yang dicapai dalam perjuangan berbagai kelompok. Equilibrium ini ditentukan oleh pengaruh relatif dari kelompok – kelompok kepentingan yang diharapkan akan menghasilkan perubahan – perubahan dalam proses pembuatan kebijakan publik.

2) Pendekatan Proses Fungsional

Harold Lasswel (Budi Winarno, 2002: 41) mengemukakan tujuh kategori analisis fungsional yang dapat digunakan sebagai dasar bagi pembahasan teori fungsional, yaitu:

a) Intelegensi, bagaimana informasi tentang masalah–masalah kebijakan yang mendapat perhatian para pembuat keputusan – keputusan kebijakan dikumpulkan dan diproses.
b) Rekomendasi, bagaimana rekomendasi – rekomendasi atau alternatif – alternatif untuk mengatasi suatu masalah tertentu dibuat dan dikembangkan.

c) Preskripsi, bagaimana peraturan – peraturan umum dipergunakan atau diterapkan dan oleh siapa.
d) Permohonan, siapa yang menentukan apakah perilaku tertentu bertentangan dengan peraturan – peraturan atau undang – undang dan menuntut penggunaan peraturan atau undang – undang.
e) Aplikasi, bagaimana undang – undang atau peraturan sebenarnya diterapkan atau diberlakukan.
f) Penilaian, bagaimana pelaksanaan kebijakan, keberhasilan atau kegagalan itu dinilai.
g) Terminasi, bagaimana peraturan – peraturan atau undang – undang semula dihentikan atau dilanjutkan dalam bentuk yang berubah atau dimodifikasi.

3) Pendekatan Kelembagaan (*Institusionalisme*)

Suatu kebijakan tidak menjadi kebijakan publik sebelum kebijakan itu ditetapkan dan dilaksanakan oleh suatu lembaga pemerintah. Lembaga – lembaga pemerintah memberi dua karakteristik yang berbeda terhadap kebijakan publik. **Pertama,** Pemerintah memberi legitimasi kepada kebijakan – kebijakan. **Kedua,** Kebijakan – kebijakan pemerintah memerlukan universalitas.

4) Pendekatan Peran Serta Warganegara

Dengan keikutsertaan warganegara dalam masalah–masalah masyarakat, maka para warganegara akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman, mengembang-kan rasa tanggung jawab social yang penuh, dan

menjangkau perspektif mereka diluar batas – batas kehidupan pribadi.

Apapun model pendekatan yang hendak dipilih dalam menganalisis kebijakan publik adalah pada aspek tujuan dari perumusan kebijakan publik itu sendiri, yaitu untuk kesejahteraan rakyat.

C. Meta Evaluasi Program Kebijakan Pendidikan Karakter

Untuk mencapai tujuan di bidang pendidikan, pemerintah pusat mengeluarkan sejumlah kebijaksanaan, yang kemudian kebijakan tersebut menjadi bagian untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Program pendidikan karakter tahun 2010 yang dimasukkan dalam RAN merupakan program khusus pendidikan karakter dan kegiatan yang sudah ada serta bermuatan pendidikan karakter. Pada tahun 2011 hanya program pendidikan karakter saja yang masuk dalam RAN pendidikan karakter. Program tersebut merupakan program inovatif yang sesuai dengan renstra dan desain induk pendidikan karakter. Suatu program disebut inovatif jika memenuhi salah satu kriteria dari beberapa kriteria berikut ini:

1. Belum pernah dilakukan pada kegiatan tahun sebelumnya;
2. Berupa pemecahan masalah karakter bangsa saat ini dan yang akan datang;
3. Mengadaptasi model pendidikan karakter yang baik dari budaya daerah atau negara
4. Mengandung keunikan dan/atau keaslian;

5. Memiliki indikator kinerja kunci yang jelas dan operasional.

Program pendidikan karakter ini merupakan intensitas yang benar-benar harus dengan sengaja direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi. Program tersebut harus mempunyai dampak langsung (bukan dampak pengiring) terhadap pembentukan karakter. Kegiatan pendidikan karakter yang terintegrasi dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan lain (didanai oleh kegiatan pendidikan lain itu) tidak perlu dimasukkan dalam RAN. Program yang masuk dalam RAN 2011 dirancang dengan enam struktur program seperti yang tersebut di atas mulai dari harmonisasi kebijakan pendidikan karakter sampai dengan implementasi dan diseminasi pendidikan karakter.

Keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan karakter dapat diukur melalui 6 variabel untuk menilai kebijakan sebagaimana disebutkan oleh Van Meter dan Van Horn (Budi Winarno, 2002: 111), yaitu sebagai berikut:

a. Ukuran – ukuran dasar dan tujuan kebijakan
b. Sumber – sumber kebijakan
c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan – kegiatan pelaksanaan.
d. Karakteristik badan – badan pelaksana.
e. Kondisi – kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
f. Kecenderungan pelaksana (*implementers*).

Adapun aplikasi masing – masing variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Ukuran – ukuran dasar dan tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor – faktor yang menentukan pencapaian kebijakan. Ukuran – ukuran dasar dan tujuan kebijakan berguna di dalam menguraikan tujuan – tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Di samping itu ukuran–ukuran dasar dan tujuan kebijakan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus. Dari hasil analisa penulis bahwa sasaran atau fokus kebijakan beserta tujuan yang akan dicapai dengan dikeluarkannya kebijakan pendidikan karakter untuk penyelenggaraan otonomi pendidikan dan desentralisasi pendidikan belum merata.

b. Sumber – sumber kebijakan

Sumber – sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber–sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Hal ini akan menopang pelaksanaan pendidikan karakter itu sendiri, misalnya sarana dan prasarana penunjang yang ada di sekolah.

c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan – kegiatan pelaksanaan.

Komunikasi di dalam dan antara organisasi–organisasi merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan sulit dalam meneruskan pesan – pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpannya atau menyebarluaskannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Analisa penulis harus dilakukan sistem monitoring

sebagai salah satu wujud komunikasi antar organisasi dalam hal ini antara sekolah dengan Dikpora dan kegiatan yang dilakukan melalui pengiriman pengawas dari Dikpora untuk mengevaluasi seluruh kegiatan yang dilakukan pihak sekolah dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendidikan karakter di sekolah masing - masing.

d. Karakteristik badan – badan pelaksana.

Karakteristik badan – badan administratif berkaitan dengan struktur birokrasi yakni karakteristik – karakteristik, norma – norma dan pola – pola hubungan yang terjadi berulang – ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Menurut penulis hal ini akan terkait dalam menilai karakteristik – karakteristik, norma – norma dan pola – pola hubungan yang terjadi berulang – ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan tidak terlihat dengan begitu jelas justru yang ada hanyalah penilaian terhadap kelengkapan sarana dan prasarana penunjang sehingga birokrasi sebagai institusi yang dominan dalam pelaksanaan program kebijakan, yang tingkat kepentingannya berbeda untuk masing – masing tahap tidak terlalu mengganggu dalam proses implementasi kebijakan tersebut.

e. Kondisi – kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

Kondisi – kondisi ekonomi, sosial, dan politik merupakan pusat perhatian yang besar dalam mengidentifikasikan pengaruh variabel – variabel

lingkungan dari hasil – hasil kebijakan. Menurut penulis kesiapan yang dilakukan masih diwarnai keterbatasan yang ada. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh belum jelasnya aturan yang mewadahi yang disusun dalam sebuah instrumen hukum dalam hal ini adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) dan Peraturan Pemerintah yang hingga saat ini belum dikeluarkan sebagai dasar pijakan pelaksanaan kurikulum 2006 untuk semua jenjang pendidikan.

f. Kecenderungan pelaksana (*implementers*).

Berkaitan dengan kemampuan dan keinginan dari pelaksana kebijakan dalam menerapkan kebijakan itu sendiri, seperti; kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu. Hasil penelitian menunjukkan Kecenderungan pelaksana yang terkait dengan kemampuan dan keinginan dari pelaksana kebijakan dalam menerapkan kebijakan itu sendiri, seperti; kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan (penerimaan yang bersifat proaktif) lebih kecil dan intensitas tanggapan lebih besar. Hal ini dikarenakan masing – masing Kepala Sekolah berusaha melaksanakan kebijakan dari atasannya. Melihat kondisi tersebut khususnya praktik pelaksanaan ketentuan dari atasan para kepala sekolah masih bersifat *pattern clien*. Maka dengan sendirinya tidak terlepas dari kondisi dan situasi yang ada pada setiap Sekolah, misalnya jumlah dan kualitas guru, jenis referensi yang digunakan dan kesiapan guru dalam melaksanakan pendidikan karakter. Hal tersebut

dipengaruhi juga adanya ketidakjelasan dan kelemahan pada sisi hukum, karena kebijakan mengenai pelaksanaan pendidikan karakter belum ada payung hukum yang langsung mengatur pelaksanaan pendidikan karakter.

Sehubungan dengan variabel pelaksanaan kebijakan tersebut, masing – masing Kepala Sekolah di semua tingkat pendidikan akan berusaha melaksanakan kebijakan dari atasannya. Melihat kondisi di sekolah khususnya praktik pelaksanaan ketentuan dari atasan para kepala sekolah masih bersifat ***pattern clien***, maka dengan sendirinya tidak terlepas dari kondisi dan situasi yang ada pada sekolah, misalnya jumlah dan kualitas guru, jenis referensi yang digunakan dan kesiapan guru dalam melaksanakan pendidikan karakter itu sendiri.

Selanjutnya dilihat dari sisi model pembuatan kebijakan, maka kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah termasuk kebijakan Incremental Model . Model yang keempat dari ke tujuh model yang ada ini berasal dari teorinya Charles E. Linblom yang terkenal dengan sebutan "*muddling through"* menjelaskan bagaimana kebijaksanaan itu dibuat. Kebijaksanaan dibuat atas dasar "perubahan yang sedikit "dari kebijaksanaan – kebijaksanaan yang telah ada sebelumnya. Jadi kebijaksanaan – kebijaksanaan yang lama dipakai sebagai dasar/pedoman untuk membuat kebijaksanaan yang baru. Model mekanisme kerja yang dipakai adalah Model ke 3. Model ini merupakan varian dari model I, dimana pihak Eksekutif dan Legislatif secara bersama melihat pentingnya kebijakan publik baru, atau mengubah yang lama. Selanjutnya prosesnya lebih banyak

dikerjakan Eksekutif bersama tim pakarnya. Baik DPRD II maupun Eksekutif tingkat II sewaktu – waktu menerima atau mencari masukan dari masyarakat, sementara tim pakar berkewajiban menggali aspirasi masyarakat.

BAB V
NASIONALISME DALAM IMPLEMENTASI REVOLUSI MENTAL

Revolusi Mental, sebuah cita-cita yang ingin diraih dalam mewujudkan bangsa yang mandiri dan berdikari. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Revolusi Mental, bahwa Revolusi mental adalah Gerakan seluruh rakyat Indonesia bersama pemerintah untuk memperbaiki karakter bangsa menjadi Indonesia yang lebih baik. Revolusi mental juga bertujuan untuk mengubah pola pikir *(mindset)* negatif menjadi positif dan membentuk manusia Indonesia yang berkarakter. Revolusi mental suatu keharusan, agar bangsa menjadi sejajar dengan bangsa lain. Era globalisasi sudah merambah di negeri ini, dimana batas-batas geografi, sosial budaya menjadi kurang penting. Kita juga mengalami krisis nilai dan karakter, krisis pemerintah, krisis relasi sosial.

Perlunya revolusi mental adalah karena penyakit seperti emosi/mental/jiwa akan berdampak pada individu seperti malasnya seseorang dan tidak mempunyai karakter. Kemudian dampaknya akan menular kepada masyarakat yang ditandai dengan gangguan ketertiban, keamanan, kenyamanan, kecemburuan sosial, dan

ketimpangan sosial. Lebih jauh lagi, akan berdampak negatif pada bangsa dan negara. Bangsa kita akan lemah dan menjadi tidak bermartabat. Kemudian produktivitas dan daya saing kita menjadi rendah. Revolusi mental sesungguhnya adalah ikhtiar untuk mencapai tujuan utama Pembangunan Nasional, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Revolusi mental dapat dimaknai sebagai suatu pendekatan dalam mengejawantahkan cita-cita luhur para pendiri Bangsa. Bangsa yang maju ditentukan oleh mentalitas yang tangguh, baik individual maupun kolektif dari warga negaranya. Revolusi mental sebagai gerakan kolektif yang melibatkan seluruh Bangsa dengan memperkuat peran semua Institusi Pemerintah.

Nasionalisme berasal dari Bahasa asing "*nation*" yang berarti lahir atau kelahiran, yang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi bangsa. Nasionalisme adalah sebuah cita-cita yang ingin memberi batas antara "kita yang sebangsa" dengan mereka dari bangsa lain, antara "Negara kita" dan Negara mereka, hubungan cita-cita nasionalisme, yang bercorak trans-etnik dan yang menginginkan terjadinya identifikasi "bangsa" dan "Negara", bisa tersalin dalam pola perilaku, yang bahkan menurut pengorbanan (Taufik Abdullah, 2001: 45).

Taniredja, 2010: 75 membedakan empat arti nasionalisme yaitu:

1. Sebagai suatu proses sejarah actual, yaitu proses sejarah pembentukan nasionalitas sebagai unit-unit

politik, pembentukan suku dan imperium kelembagaan Negara nasional modern.

2. Sebagai suatu teori, prinsip atau implikasi ideal dalam proses sejarah actual
3. Nasionalisme menaruh kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan politik.
4. Sebagai suatu sentimen, yaitu menunjukkan keadaan pikiran diantara satu nasionalisme.

A. Ciri-Ciri Nasionalisme

Ciri nasionalisme, sebagai berikut:

1. Sudah ada persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Sifat perjuangan bersifat nasional.
3. Tujuannya untuk mencapai kemerdekaan yang nantinya ingin mendirikan suatu negara merdeka yang kekuasaannya ditangani rakyat,
4. Sudah ada organisasi modern dan bersifat nasional.
5. Mengandalkan kekuatan otak (pikiran), dimana pendidikan sangat berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

B. Indikator Sikap Nasionalisme

Menurut Aman (2011:141) ada 6 indikator yang menunjukkan sikap Nasionalisme yaitu sebagai berikut:

1. Cinta Tanah Air
2. Menghargai jasa-jasa pahlawan
3. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara
4. Mengutamakan persatuan dan kesatuan
5. Berjiwa pembaharu dan tidak kenal menyerah

6. Memiliki sikap tenggang rasa sesama manusia

Nasionalisme mahasiswa dapat dilihat dari tingkah lakunya. Adapun sikap atau tingkah laku yang mencerminkan nilai-nilai nasionalisme adalah sebagai berikut:

a. Siswa merasa senang dan bangga menjadi warga Negara Indonesia
b. Siswa mampu menghargai jasa-jasa pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia
c. Siswa giat belajar untuk menghadapi tantangan di era globalisasi
d. Siswa mempunyai rasa tolong menolong
e. Mencintai produk dalam negeri
f. Menghormati antar teman dan bapak ibu guru di sekolah.

Berikut ini adalah beberapa komponen yang harus ada dalam gerakan Indonesia bersatu dalam rangka pelaksanaan revolusi mental, antara lain:

- Kehidupan Demokrasi Pancasila
- Kerukunan Inter dan Antar Umat Beragama
- Kesadaran Nasionalisme, Patriotisme dan Kesetia-kawanan Sosial
- Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Pengakuan dan Perlindungan terhadap Kaum Minoritas, Marjinal dan Berkebutuhan Khusus
- Inisiatif dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan

- Kerja Sama Inter dan Antar Lembaga, Komponen Masyarakat dan Lintas Sektor
- Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran yang Mengganggu Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Pendidikan Agama yang Mengajarkan Keragaman, Toleransi dan Budi Pekerti

Peran Lembaga Agama, Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti, Toleransi dan Hidup Rukun

BAB VI
PENUTUP

Pendidikan karakter sebagai bagian integral dari keseluruhan tatanan sistem pendidikan nasional dikembangkan dan dilaksanakan secara sistemik dan holistik dalam tiga pilar nasional pendidikan karakter, yaitu: satuan pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, satuan/program pendidikan nonformal), keluarga (keluarga inti, keluarga luas, keluarga orang tua tunggal), dan masyarakat (komunitas, masyarakat lokal, wilayah, bangsa, dan negara). Implementasi proses pembelajaran pendidikan karakter hendaknya dilakukan secara inklusif pada pembelajaran semua mata pembelajaran di kelas, luar kelas, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Pengembangan proses pembelajaran yang demikian dimaksudkan untuk menghindarkan pendidikan karakter dari sifat yang eksklusif dimana upaya pembinaan karakter hanya dilakukan oleh mata pelajaran tertentu sementara pelajaran maupun program pendidikan lain di sekolah maupun luar sekolah termasuk di keluarga dan masyarakat tidak menyentuhnya sama sekali.

Upaya pembentukan karakter sesuai dengan budaya bangsa ini tentu tidak semata-mata hanya dilakukan di sekolah melalui serangkaian kegiatan belajar mengajar dan luar sekolah, tetapi juga melalui pembiasaan (habituasi)

dalam kehidupan, seperti: religius, jujur, disiplin, toleransi, kerja keras, cinta damai, tanggung jawab dan sebagainya. Pembiasaan itu bukan hanya mengajarkan pengetahuan tentang hal yang benar dan salah, tetapi juga mampu merasakan terhadap nilai yang baik dan tidak baik serta bersedia melakukannya dengan lingkup terkecil seperti keluarga sampai dengan cakupan yang lebih luas di masyarakat. Nilai tersebut perlu ditumbuh-kembangkan peserta didik yang pada akhirnya akan menjadi cerminan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sekolah memiliki peran yang besar dalam pengembangan pendidikan karakter karena peran sekolah sebagai pusat pembudayaan melalui pendidikan pengembangan budaya sekolah (*school culture*).

Tingkat keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur melalui suatu proses dari implementasi kebijakan tersebut, sehingga implementasi merupakan suatu proses yang paling penting dari keseluruhan proses kebijakan. Kebijakan yang telah diformulasikan atau yang telah dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu atau dengan kata lain suatu kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian implementasi kebijakan bukanlah merupakan permasalahan yang sederhana, karena bagaimanapun pada tataran pelaksanaan sebuah kebijakan di dalamnya terkait banyak berbagai dimensi, mulai dari interpretasi, organisasi, dukungan sumber daya dan sumber dana, serta mentalitas budaya dari masyarakat itu sendiri.

Mengacu pada permasalahan pelaksanaan kebijakan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan bidang

pendidikan adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi serta keikutsertaan lembaga – lembaga pendidikan tinggi dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi daerah guna mendorong akselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pembangunan daerah di segala bidang.

GLOSARIUM

Pendidikan karakter merupakan dinamika pengembangan kemampuan yang berkesinambungan dalam diri manusia untuk mengadakan internalisasi nilai-nilai sehingga menghasilkan disposisi aktif, stabil dalam diri individu.

RAN, Rencana Aksi Nasional yang merupakan bagian dari perencanaan dukungan terhadap implementasi pendidikan karakter.

Momen historis, yaitu usaha merefleksikan pengalaman umat manusia yang bergulat dalam menghidupi konsep dan praksis pendidikan khususnya dalam jatuh bangun mengembangkan pendidikan karakter bagi anak didik sesuai dengan konteks zamannya.

Momen reflektif, sebuah momen yang melalui pemahaman intelektualnya manusia mencoba melihat persoalan metodologis, filosofis, dan prinsipil yang berlaku bagi pendidikan karakter.

Momen praktis, yaitu dengan bekal pemahaman teoritis konseptual itu, manusia mencoba menemukan secara efektif agar proyek pendidikan karakter dapat efektif terlaksana di lapangan

Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan – tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta,

yang diharapkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya.

Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (*nation*) dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional.

INDEKS

E

Evaluasi, 6, 7, 14, 51, 69, 70

K

Kebijakan, 1, 2, 4, 5, 11, 21, 25, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 64, 66

M

Model, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 69, 70

N

Nasionalisme, v, 59, 60, 61, 67, 69

R

Revolusi mental, v, 58

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Taufik, 2001. *Nasionalisme Dan Sejarah.* Bandung: Satya Historika.

Aman. 2011. *Model Evaluasi Pembelajaran Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Amin Ibrahim, 2004. *Pokok – pokok Analisis Kebijakan Publik (AKP)*, Bandung: Mandar Maju.

Budimansyah, D. 2010. *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa.* Bandung: Widya Aksara Press.

Center for Indonesian Civic Education. 1999. *Democratic Citizen in a Civil Society: Report of the Conference on Civic Education for Civil Society*. Bandung: CICED.

Hasanah, Aan. 2009. *Pendidikan Berbasis Karakter. http://www.mediaindonesia.com/cetak/2009/12/14/111318/68/11/Pendidikan-Berbasis-Karakter.html.* Diakses pada 10 Juni 2010.

Hesel Nogi S Tangkilan, 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi (Konsep, Strategi dan Kasus).* Yogyakarta: Lukman Offset.

Jamal Ma'mur. 2011. *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah.* Yogyakarta: Diva Press.

Kemendiknas. 2011. *Panduan Pelaksanaan pendidikan Karakter.* Jakarta: Balitbang Puskurbuk.

Kesuma, Dharma. Triatna, Chepi & Permana, Johar. 2011. *Pendidikan Karakter: kajian teori dan Praktik Di Sekolah.* Bandung: PT remaja Rosdakarya.

Kusuma, Dony. 2004. Pendidikan Karakter. Jakarta: Grasindo.

Lickona, T. 1992. *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Simon & Schuster, Inc.

Lickona, T. 2004.*Character Matters: How to Help Our Children Develop.* New York: Simon & Schuster,Inc.

M. Irfan Islami, 2000. *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara.* Jakarta: Bumi Aksara

Michael Scriven, 1994. *Evaluasi Berorientasi Pada Konsumen*. Catatan kuliah tanggal 7 Juni 2012, Universitas Sebelas Maret: Surakarta

Muchlas Samani & Hariyanto, 2011. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter.* Bandung: Remaja Rosda Karya

Muslich, Masnur. 2011. *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Tafsir, Ahmad. 2011. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Trisiana, A. 2015. The Development Strategy Of Citizenship Education in Civic Education Using Project Citizen Model in Indonesia. Journal of Psychological and Educational Research (JPER), 23 (2), pp. 111-124.

Trisiana, A. 2016. Analysis Of Character Education Policy In Indonesian School To Improve The Asean Economic Community. Research Journal of Applied Sciences (RJAS), Volume 11 (9), pp. 879-883.

Zubaedi. 2011. *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam lembaga Pendidikan.* Jakarta: Kencana.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00201944272, 1 Juli 2019
Pencipta		
Nama	:	**Anita Trisiana, Sugiaryo, , dkk**
Alamat	:	Sabrang Kulon RT 02 RW 35 Mojosongo , Surakarta, Jawa Tengah, 57126
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Anita Trisiana, Sugiaryo, , dkk**
Alamat	:	Sabrang Kulon RT02 / RW 35 Mojosongo Jebres, Surakarta, 9, 57126
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Buku**
Judul Ciptaan	:	**Buku Panduan Model Pendidikan Karakter Di Perguruan Tinggi Berbasis Nasionalisme Dan Implikasinya Terhadap Implementasi Revolusi Mental**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	1 Juni 2019, di Surakarta
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000145145

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Anita Trisiana	Sabrang Kulon RT 02 RW 35 Mojosongo
2	Sugiaryo	Sekip RT 002 RW 008
3	Rispantyo	Jl. Veteran RT 006 RW 016 Josroyo Jaten

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Anita Trisiana	Sabrang Kulon RT02 / RW 35 Mojosongo Jebres
2	Sugiaryo	Sekip RT 02 RW 008 Kadipiro Banjasari
3	Rispantyo	Jl. Veteran RT 006 RW 016 Josroyo Jaten